



**EVALUASI
PENANGANAN RUU DALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019
TANGGAL 4 JULI 2019**

I. RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Pertanahan.	DPR / KOMISI II	Ditetapkan sebagai RUU usul DPR dalam Ra.Pur. tgl. 15 Maret 2016 Surpres Tgl 20 Mei 2016 No. R-33/Pres/05/2016 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 09 Juni 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi II
2.	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR / KOMISI III	Surpres R.71/Pres/12/2016 Tgl 20 Desember 2016 Rapat Konsultasi Rapat Bamus tgl. 18 Januari MP III 2016-2017 dibahas oleh Komisi III
3.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	DPR / KOMISI IV	di tetapkan sebagai RUU usul DPR dalam Ra.Pur. tgl. 15 Maret 2016 Surpres Tgl 25 Mei 2016 No. R-35/Pres/05/2016 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 09 Juni 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi IV
4.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR / KOMISI VI	Menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 28 April 2017 Surpres R.30/Pres/07/2017 Tgl 10 Juli 2017 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 26 Juli 2017 MP.V 2016-2017 dibahas oleh Komisi VI .
5.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR / ANGGOTA	Selesai Harmonisasi 31 Januari 2017 Menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 6 April 2017 Surpres R.25/Pres/06/2017 Tgl 2 Juni 2017 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 15 Juni 2017 dibahas oleh Komisi VIII MP V 2016-2017.
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR / ANGGOTA	Sebagai RUU usul DPR dalam Ra.Pur. tgl 24 Januari 2017 Surpres R.16/Pres/03/2017 Tgl 17 Maret 2017 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 10 April 2017 dibahas oleh Baleg MP IV 2016-2017.
7.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ ANGGOTA	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2 Sept 2015 dibahas oleh Pansus MP.II. MP 2015-2016
8.	RUU tentang Pertembakauan.	DPR/ ANGGOTA	Sebagai RUU usul DPR dalam Ra.Pur. tgl 15 Des 2016 Surpres R.16/Pres/03/2017 Tgl 17

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
			Maret 2017 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 10 April 2017 dibahas oleh Pansus MP IV 2016-2017.
9.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR / ANGGOTA	Surpres Tgl 4 Mei 2016 No. R-27/Pres/05/2016 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 31 Mei 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi VI . Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 26 Juli 2017 MP.V 2016-2017 dibahas oleh Pansus .
10.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR / ANGGOTA	Surpres Tgl 9 Maret 2018 No. R-14/Pres/03/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2 April 2018 MP IV 2017-2018 dibahas oleh Komisi IV
11.	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	DPR / KOMISI IV	Surpres Tgl 6 April 2018 No. R-18/Pres/04/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 25 April 2018 MP IV 2017-2018 dibahas oleh Komisi IV
12.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR / ANGGOTA	Surpres Tgl 18 April 2018 No. R-19/Pres/04/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2 Juli 2018 MP V 2017-2018 dibahas oleh Badan Legislasi
13.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR / KOMISI VII	Surpres Tgl 5 Juni 2018 No. R-29/Pres/06/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2 Juli 2018 MP V 2017-2018 dibahas oleh Komisi VII
14.	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR / KOMISI V	Surpres Tgl 7 Juni 2018 No. R-31/Pres/06/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl MP V 2017-2018 2 Juli 2018 dibahas oleh Komisi V
15.	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR / ANGGOTA	Surpres Tgl 24 September 2018 No. R-48/Pres/09/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 9 Oktober 2018 MP I 2018-2019 dibahas oleh Komisi XI
16.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR / KOMISI VI	Surpres Tgl 3 Desember 2018 No. R-55/Pres/12/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 11 Desember 2018 MP II 2018-2019 dibahas oleh Komisi VI
17.	RUU tentang Pekerja Sosial	DPR / KOMISI VIII	Surpres Tgl 30 November 2018 No. R-54/Pres/11/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 11 Desember 2018 MP II 2018-2019

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
			dibahas oleh Komisi VIII
18.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR / ANGGOTA	Selesai disusun oleh Badan Legislasi atas Usul Anggota DPR Tgl 25 Juli 2018 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada tanggal 2 Oktober 2018 Surpres Tgl 5 Desember 2018 No. R-56/Pres/12/2018 MP. III 2018-2019 Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tgl 7 Januari 2019 dibahas oleh Komisi X
19.	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	DPR / ANGGOTA	Surat dari 21 Anggota FPPP No. 1235/KD/XI/2017 Tgl 20 November 2017 permintaan utk di harmonisasi Selesai harmonisasi Tgl 13 September 2018 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada tanggal 16 Oktober 2018 MP. III 2018-2019 Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tgl 7 Januari 2019 dibahas oleh Komisi VIII
20.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR / KOMISI VII	Surat Komisi VII No. LG/07739/DPRRI/IV/2017 tgl 27 April 2017 permintaan utk di harmonisasi Selesai harmonisasi Tgl 10 September 2018 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada tanggal 16 Oktober 2018 Surpres Tgl 29 Januari 2019 No. R-05/Pres/01/2019 MP. III 2018-2019 Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tgl 7 Januari 2019 dibahas oleh Komisi VII
21.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III MP. IV 2014-2015 sesuai Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 24 Juni 2015.
22.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PEMERINTAH	Berdasarkan rapat Bamus Tanggal 19 Mei 2016 dibahas oleh Komisi XI MP V 2015-2016
23.	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	PEMERINTAH	Surpres R.20/Pres/03/2017 Tgl 31 Maret 2017 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 27 April 2017 dibahas oleh Pansus MP IV 2016-2017.
24.	RUU tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH	Surpres No: R-47/Pres/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Rapat Bamus tgl. 23 Oktober 2017 MP I 2017-2018 dibahas oleh Komisi III

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
25.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH	Surpres Tgl 17 Juli 2018 No. R-35/Pres/07/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 25 Juli MP V 2017-2018 dibahas oleh Komisi XI
26.	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH	Surpres Tgl 16 Juli 2018 No. R-34/Pres/07/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 6 September 2018 MP I 2018-2019 dibahas oleh Komisi XI
27.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan.	PEMERINTAH	Surpres Tgl 12 November 2018 No. R-53/Pres/11/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 29 November 2018 MP II 2018-2019 dibahas oleh Komisi III
28.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	Surpres Tgl 1 Februari 2019 No. R-08/Pres/02/2019 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 7 Februari MP III 2018-2019 dibahas oleh Komisi VI
29.	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD	Surpres Tgl 16 Mei 2016 No. R-30/Pres/05/2016 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 31 Mei 2016 MP.V 2015-2016 dibahas oleh Komisi X
30.	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 19 Nov 2015 dibahas oleh Pansus MP.II. 2015-2016
31.	RUU tentang Daerah Kepulauan.	DPD	Surpres Tgl 21 Desember 2017 No. R-56/Pres/12/2017 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl. 15 Januari 2018 MP.III 2017-2018 dibahas oleh Pansus
32.	RUU tentang Perkoperasian	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka. Surpres No: R-48/Pres/07/2016 Tgl 26 Juli 2016 MP. I 2016-2017 Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tgl 1 September 2016 dibahas oleh Komisi VI

II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	Selesai disusun oleh Baleg pada tanggal 28 Mei 2019 Disetujui Menjadi RUU Usul DPR pada Rapur Tgl 4 Juli 2019 Menunggu Surpres

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR	Selesai disusun oleh Baleg pada tanggal 2 Juli 2019 Menunggu Paripurna sebagai RUU Usul DPR

III. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR	Surat Komisi I No. 017/Kom.I/MP.III/02/2017 tgl 6 Februari 2017 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi
2.	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR	Surat Anggota DPR lintas Fraksi Tgl 24 Okt 2016 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi
3.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR	Surat Komisi IX No. LG/09941/DPR RI/VII/2019 Tgl 1 Juli 2019 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi

IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	DPR	Anggota
2.	RUU tentang Penyadapan	DPR	Badan Legislasi

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	Komisi V
4.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR	Komisi VII
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR	Badan Legislasi
6.	RUU tentang Permusikan	DPR	Berdasarkan Hasil Rakor Tgl 17 Juni 2019 ditarik dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019
7.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	Anggota

V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	Proses Surpres
2.	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	PEMERINTAH	Proses Surpres
3.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	PEMERINTAH	Proses Surpres
4.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	Proses Surpres
5.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH	Proses Surpres
6.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	Proses Surpres
7.	RUU tentang Data Pribadi	PEMERINTAH	Proses Surpres

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
8.	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH	Proses Surpres

VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	Proses Penyusunan

VII. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam)	DPR	Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 3 Desember 2018 Sebagai Hasil kinerja Tahun 2018
2.	RUU tentang Kebidanan.	DPR / KOMISI IX	Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 13 Februari 2019
3.	RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerjasama Industri Pertahanan	PEMERINTAH	RUU Terbuka. Kumulatif Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 13 Februari 2019
4.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates</i>)	PEMERINTAH	RUU Terbuka. Kumulatif Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 13 Februari 2019
5.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR/ KOMISI VIII	Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 28 Maret 2019

6.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federal Rusia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence</i>)	PEMERINTAH	RUU Terbuka. Kumulatif Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 28 Maret 2019
7.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (<i>Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition</i>)	PEMERINTAH	RUU Terbuka. Kumulatif Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 4 Juli 2019
8.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition</i>)	PEMERINTAH	RUU Terbuka. Kumulatif Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 4 Juli 2019